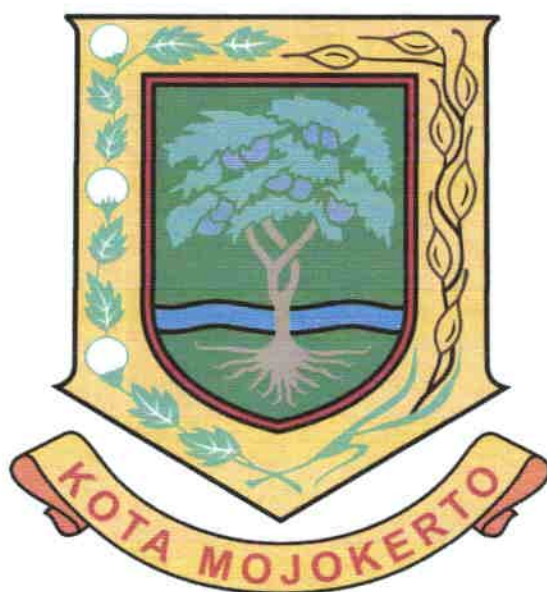


**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2018**



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA MOJOKERTO**

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pada rancangan undang-undang atau peraturan daerah tentang Laporan Keuangan pemerintah pusat/daerah disertakan atau dilampirkan informasi tambahan mengenai Kinerja instansi pemerintah, yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh Pengguna Anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Pengungkapan informasi tentang Kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (outputs) dari setiap kegiatan dan hasil (outcomes) dari setiap program. Untuk keperluan tersebut, perlu disusun suatu sistem akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah yang terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, sistem penganggaran, dan Sistem Akuntansi Pemerintahan, sehingga dapat dihasilkan suatu Laporan Keuangan dan Kinerja yang terpadu.

Penyelenggaraan pemerintahan yang berpedoman pada salah satu Asas Umum Penyelenggaraan Negara menuntut adanya akuntabilitas kinerja pemerintahan berupa pertanggungjawaban pelaksanaan kewenangan pemerintahan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata, tercermin dalam Rencana Strategis.

Pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, dimana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota harus disampaikan kepada gubernur, menteri perencanaan Pembangunan Nasional/kepala Bapenas, Menteri Pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja **dinas pemberdayaan perempuan,**

perlindungan anak, dan keluarga berencana Kota Mojokerto Tahun 2018 didasarkan pada : Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto dan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor : 82 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 79 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas dan fungsi serta tata kerja **dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana** Kota Mojokerto mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang **pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana**. Dan untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana Kota Mojokerto mempunyai fungsi :

- a. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah kota ;
- b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan ;
- c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan ;
- d. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan ;
- e. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat kota ;
- f. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan ;
- g. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak ;
- h. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan Gender dan hak anak ;
- i. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan Gender dan hak anak ;
- j. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data Gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat kota ;
- k. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha tingkat kota ;
- l. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kota ;
- m. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota ;
- n. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi kota ;
- o. Penguatan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kota;

- p. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah propinsi dengan kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk ;
- q. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk ;
- r. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya local ;
- s. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB) ;
- t. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB ;
- u. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB ;
- v. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga ;
- w. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga ;
- x. Pelaksanaan Standart Pelayanan Publik (SPP) dan Standart Operasional Prosedur (SOP) ;
- y. Pengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan
- z. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana Kota Mojokerto terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Sekretaris :
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
 - Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak
 - Seksi Pencegahan kekerasan, dan eksploitasi Perempuan dan Anak (PKEPA)
- d. Bidang Pemberdayaan Perempuan, PUG, PUHA dan Pemberdayaan Masyarakat
 - Seksi Pemberdayaan Ekonomi, Partisipasi dan peningkatan kualitas Hidup Perempuan
 - Seksi Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan PUG dan PUHA
 - Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - Seksi Pengendalian dan Penggerakan Penduduk
 - Seksi Keluarga Berencana

C. ASPEK STRATEGIS dan PERMASALAHAN UTAMA KOTA MOJOKERTO

Aspek Strategis dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana dijabarkan seperti berikut : Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto dan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor : 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto.

Program Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana merupakan bagian dari pembangunan prioritas di Pemerintah Kota Mojokerto guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang ditandai meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan tercapainya penduduk tumbuh seimbang. Pembangunan program KB ini diarahkan dalam upaya pengendalian kuantitas penduduk melalui 3 fokus prioritas, yaitu revitalisasi program keluarga berencana, penyerasian kebijakan pengendalian penduduk, dan peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu. Namun dalam pelaksanaannya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mendapatkan amanah untuk melaksanakan revitalisasi KB dan penyerasian kebijakan pengendalian penduduk di Kota Mojokerto

Permasalahan utama **dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana** adalah sebagai berikut :

- 1) Masih tingginya jumlah perkawinan pertama wanita usia dibawah 20 tahun ;
- 2) Budaya masyarakat yang masih menempatkan perempuan hanya disektor domestik ;
- 3) Rendahnya kesadaran dan penegakan hukum tentang perlindungan Perempuan dan Anak ;

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor Tahun 2018 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2015-2019 :

"

TERWUJUDNYA KELUARGA YANG HARMONIS DAN SEJAHTERA

"

Dan Berdasarkan visi yang telah ditetapkan tersebut di atas, untuk mewujudkan arah pandang Pemerintah Kota Mojokerto telah menetapkan misi yang akan diemban atau dilaksanakan dalam jangka waktu menengah yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana dan Kualitas pelayanan Keluarga Berencana.
2. Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Sebagai upaya untuk mencapai Misi 1 yakni Meningkatkan sarana dan prasarana dan Kualitas pelayanan Keluarga Berencana. . maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk melalui program Keluarga Berencana (KB dengan Sasaran Pembangunan :
 1. Menurunnya Perkawinan Usia Istri dibawah 20 tahun (Terwujudnya Pendewasaan Usia Perkawinan)
 2. Meningkatnya cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif.
 3. Meningkatnya cakupan peserta KB Aktif Metode Jangka Panjang (MKJP)

Sebagai upaya untuk mencapai Misi 2 yakni Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan dan Anak. . maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Merwujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan dengan Sasaran Pembangunan :
 1. . Meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan

2. Meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan
 3. Menurunnya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki
- b. Meningkatkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pembangunan dan meningkatkan kualitas penanganan Kasus KDRT. dengan Sasaran Pembangunan :
1. Meningkatnya pengetahuan SDM aparatur untuk Peningkatan kualitas pelayanan dan penanganan Kasus KDRT.
 2. Meningkatnya penanganan berbagai kasus kekerasan dan trafiking terhadap perempuan dan anak

B. PERJANJIAN KINERJA

Dalam upaya implementasi penjabaran visi dan misi Kota Mojokerto sebagaimana yang sudah di tetapkan dalam RPJMD 2015-2019, Pemerintah Kota Mojokerto telah membuat Perjanjian Kinerja tahun 2018 yaitu :

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Menurunnya Perkawinan Usia Istri dibawah 20 tahun (Terwujudnya Pendewasaan Usia Perkawinan)	1. 1. Prosentase Perkawinan istri dibawah Usia 20 Tahun (Target 50 %	%	<16
2	Meningkatnya cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif.	2. Cakupan peserta KB aktif	%	75
3	Meningkatnya cakupan peserta KB Aktif Metode Jangka Panjang (MKJP)	3. Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif MKJP	%	34,4
4	Meningkatkan partisipasi angkatan kerja	4. Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	%	67

	perempuan				
5	Menurunnya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki	5.	Indeks Pembangunan Gender	angka	90
		6.	Indeks Pemberdayaan Gender	angka	75
		7.	Persentase anggaran responsive gender (AGR)	%	70
6	Meningkatnya penanganan berbagai kasus kekerasan dan trafiking terhadap perempuan dan anak	8.	Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang diselesaikan oleh P2TP2A	%	90

Untuk mencapai sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, harus didukung dengan program - program berikut :

1. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
2. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
3. Program Keluarga Berencana
4. Program Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
5. Program pengembangan model operasional BKB Posyandu PADU
6. Program Pelayanan kontrasepsi
7. Program Pembinaan peran serta Masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
8. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
9. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
10. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan jender dan anak
11. Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas kinerja terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan kualitas terukur dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat .

Sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Pemerintah Kota Mojokerto membuat laporan kinerja tahunan yang memberikan gambaran tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian kinerja Tahun 2017.

Perjanjian kinerja Tahun 2017 ditetapkan berdasarkan dokumen RPJMD 2014-2019 dengan memuat target indikator kinerja utama Pemerintah Kota Mojokerto.

Analisis dilakukan untuk mengenali faktor penyebab keberhasilan maupun kegagalan pencapaian indikator kinerja utama, serta pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program yang telah ditetapkan untuk mencapai sasaran dan tujuan tersebut.

A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Analisis tentang capaian tujuan strategis dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian kinerja pada Tahun 2018 disajikan per misi dalam uraian berikut:

Misi 1 : Meningkatkan sarana dan prasarana dan Kualitas pelayanan Keluarga Berencana.

Misi-1 ini terdiri dari 1 tujuan yaitu:

Tujuan-1. Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk melalui program Keluarga Berencana (KB dengan Sasaran Pembangunan :

1. Menurunnya Perkawinan Usia Istri dibawah 20 tahun (Terwujudnya Pendewasaan Usia Perkawinan)
2. Meningkatnya cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif.

3. Meningkatnya cakupan peserta KB Aktif Metode Jangka Panjang (MKJP)

**1.1.1 Sasaran Menurunnya Perkawinan Usia Istri dibawah 20 tahun
(Terwujudnya Pendewasaan Usia Perkawinan)**

Capaian masing – masing indikator kinerja pada sasaran-1 adalah sebagai berikut :

1.1.1.1 1. Prosentase Perkawinan istri dibawah Usia 20 Tahun (Target 50 %

Perkawinan ideal untuk perempuan adalah minimal Usia 21 tahun dan untuk laki-laki minimal usia 25 tahun

Pengukuran Capaian Kinerja Indikator 1. Prosentase Perkawinan istri dibawah Usia 20 Tahun (Target 50 % :

Jumlah perkawinan istri dibawah usia 20 tahun
----- x 100

Jumlah perkawinan semua usia

Tabel 3.1

Capaian Kinerja Indikator 1. Prosentase Perkawinan istri dibawah Usia 20 Tahun (Target 50 %

		SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN	2018		
			Target	Realisasi	Capaian
		(1)	(2)	(3)	(4)
1.1.1		Menurunnya Perkawinan Usia Istri dibawah 20 tahun (Terwujudnya Pendewasaan Usia Perkawinan)			
	1.1.1.1	1. Prosentase Perkawinan istri dibawah Usia 20 Tahun (Target 50 %	<16	13,8	100

Berdasarkan data laporan Usia Kawin Pertama Penduduk Wanita Kota Mojokerto yang terjadi selama tahun 2018, dimana prosentase perkawinan istri dibawah 20 tahun targetnya kurang dari 16 % dalam realisasinya dari jumlah perkawinan yang terjadi selama tahun 2018 sebanyak 978 perkawinan, pencapaian perkawinan istri dibawah 20 tahun jumlahnya sebanyak 135 perkawinan atau sebesar 13,80 %, angka prosentasenya melebihi target yang kurang dari 16%.Hal ini menunjukkan bahwa angka pencapaiannya angka target kinerja tersebut hal ini menunjukkan keberhasilan karena kita dapat menekan terjadinya perkawinan penduduk wanita usia dibawah 20 tahun sebesar 13,75 %.

1.1.2 Sasaran Meningkatnya cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif.

Capaian masing – masing indikator kinerja pada sasaran-2 adalah sebagai berikut :

1.1.2.1 Cakupan peserta KB aktif

peserta KB aktif adalah merupakan target nasional untuk bisa menekan laju pertumbuhan penduduk

Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Cakupan peserta KB aktif :

Jumlah peserta KB aktif

----- x 100

Jumlah PUS (Pasangan Usia Subur)

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Indikator Cakupan peserta KB aktif

		SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN	2018		
			Target	Realisasi	Capaian
		(1)	(2)	(3)	(4)
1.1.2		Meningkatnya cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif.			

1.1.2.1	Cakupan peserta KB aktif	75	75,08	100
---------	--------------------------	----	-------	-----

Sebagai upaya dalam meningkatkan cakupan peserta KB aktif di Kota Mojokerto, sesuai dengan target capaian kinerja 2018 yg telah dibuat sebesar 75 % dengan harapan dapat membawa dampak pada upaya menurunkan laju pertumbuhan penduduk di Kota Mojokerto melalui program KB maka pada tahun 2018 dari jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang ada di Kota Mojokerto sebanyak 20.107 PUS dapat direalisasikan menjadi peserta KB Aktif sebanyak 15.096 atau 75,08 % sehingga hasil capaian kinerjanya sebesar 100,11 %. Dengan hasil capaian kinerja seperti itu tentunya sudah melebihi dari target yang telah ditetapkan meskipun selisihnya kecil sekali yaitu hanya 0,11 %. Dengan capaian sebesar itu berarti target indikator kinerja tahun 2018 ini telah dapat tercapai. Perlu dilaporkan juga disini bahwa upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan cakupan peserta KB aktif adalah berupa kegiatan-kegiatan pelayanan KB, selain dilakukan melalui kegiatan pelayanan KB rutin di berbagai fasilitas pelayanan KB (Faskes KB) yang tersebar diberbagai tempat juga dilakukan melalui kegiatan pelayanan KB yang bersifat momentum misalnya pelayanan KB dalam rangka Satrak PKK, Harganas, Gelar Bhakti IBI dan lain-lain yang merupakan kegiatan pelayanan KB masal yang terpusat disatu tempat Fasilitas pelayanan KB yang telah ditentukan.

1.1.3 Sasaran Meningkatnya cakupan peserta KB Aktif Metode Jangka Panjang (MKJP)

Capaian masing – masing indikator kinerja pada sasaran-3 adalah sebagai berikut :

1.1.3.1 Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif MKJP

Peserta KB aktif MKJP adalah peserta KB jangka panjang yang memakai alat KB mantap (IUD, Implan, MOW dan MOP)

Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif MKJP :

Jumlah Peserta KB aktif MKJP

----- x 100

Jumlah peserta KB aktif semua methode

Tabel 3.3

Capaian Kinerja Indikator Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif MKJP

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN		2018		
		Target	Realisasi	Capaian
(1)		(2)	(3)	(4)
1.1.3	Meningkatnya cakupan peserta KB Aktif Metode Jangka Panjang (MKJP)			
1.1.3.1	Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif MKJP	34,4	37,08	107

Selain meningkatkan cakupan peserta KB aktif yang merupakan peningkatan peserta KB aktif untuk semua jenis metode kontrasepsi maka diperlukan juga meningkatkan cakupan peserta KB aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) karena dengan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang secara teoritis berpengaruh besar terhadap terjadinya drop out menjadi peserta KB aktif bahkan berdasarkan penelitian penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) ini mempunyai pengaruh besar terhadap laju pertumbuhan penduduk. Pada tahun 2018 ini target capaian kinerja indikator cakupan peserta KB aktif MKJP ditetapkan sebesar 34,4 % dan dari target tersebut dari jumlah peserta KB Aktif semua metode sebanyak 15.096 akseptor realisasinya jumlah peserta KB aktif MKJP sebanyak 5.597 akseptor atau sebesar 37,08 % atau dengan hasil capaian kinerja sebesar 107,79 %. Dengan demikian capaian kinerja indikator cakupan peserta KB Aktif MKJP 2018 ini telah melampaui target yang ditetapkan yaitu 7,79 %.

Misi 2 : Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Misi-2 ini terdiri dari 2 tujuan yaitu:

Tujuan-1. Merwujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan dengan Sasaran Pembangunan :

1. . Meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan
2. Meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan
3. Menurunnya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki

2.1.1 Sasaran . Meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan

Capaian masing – masing indikator kinerja pada sasaran-1 adalah sebagai berikut :

2.1.1.1 1. Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan Anggota kelompok UPPKS yang punya usaha (Target 65 %)

Anggota kelompok UPPK adalah kelompok perempuan yang ikut KB (Akseptor KB) yang memiliki usaha dalam bimbingan BKKBN (DP3AKB) dengan tujuan agar dapat membantu kebutuhan keluarga dan mewujudkan Keluarga yang Sejahtera

Pengukuran Capaian Kinerja Indikator 1. Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan Anggota kelompok UPPKS yang punya usaha (Target 65 %) :

Jumlah Kelompok UPPKS yang punya usaha

----- x 100

Jumlah total kelompok UPPKS

Tabel 3.4

Capaian Kinerja Indikator 1. Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan Anggota kelompok UPPKS yang punya usaha (Target 65 %)

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN		2018		
		Target	Realisasi	Capaian
(1)		(2)	(3)	(4)
2.1.1	. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan			
2.1.1.1	1. Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan Anggota kelompok UPPKS yang punya usaha (Target 65 %)	52	52	100

Kelompok UPPKS adalah usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera yaitu kelompok usaha ekonomi produktif yang beranggotakan sekumpulan anggota keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri dari berbagai tahapan keluarga sejahtera, baik pasangan usia subur yang sudah ber KB maupun yang sudah ber KB dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga.

2.1.2 Sasaran Meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan

Capaian masing – masing indikator kinerja pada sasaran-2 adalah sebagai berikut :

2.1.2.1 Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan

karena antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama

Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan :

Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan
 ----- x 100

Jumlah angkatan kerja perempuan

Tabel 3.5

Capaian Kinerja Indikator Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan

		SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN	2018		
			Target	Realisasi	Capaian
			(2)	(3)	(4)
		(1)			
2.1.2		Meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan			
	2.1.2.1	Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	52	52	100

Presentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Pekerja perempuan di lembaga pemerintahan dapat dikelompokkan dari jumlah angkatan kerja perempuan penduduk Kota Mojokerto 3,5 % berpartisipasi di lembaga pemerintah berdasarkan data tersebut partisipasi perempuan di lembaga pemerintah masih rendah.

2.1.3 Sasaran Menurunnya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki

Capaian masing-masing indikator kinerja pada sasaran-3 adalah sebagai berikut :

2.1.3.1 Indeks Pembangunan Gender

karena antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama

Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Indeks Pembangunan Gender :

$1/3$ (Angka harapan hidup + Indeks pendidikan + Indeks daya beli)

Tabel 3.6

Capaian Kinerja Indikator Indeks Pembangunan Gender

		SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN	2018		
			Target	Realisasi	Capaian
		(1)	(2)	(3)	(4)
2.1.3		Menurunnya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki			
	2.1.3.1	Indeks Pembangunan Gender	90	93	103

Pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan untuk di Kota Mojokerto kesetaraan gender 90% cukup tinggi.

2.1.3.2 Indeks Pemberdayaan Gender

karena antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama

Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Indeks Pemberdayaan Gender :

1/3 (Keterwakilan di parlemen + Indeks pengambilan keputusan + Indeks Distribusi pendapatan)

Tabel 3.7

Capaian Kinerja Indikator Indeks Pemberdayaan Gender

		SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN	2018		
			Target	Realisasi	Capaian
		(1)	(2)	(3)	(4)
2.1.3		Menurunnya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki			
	2.1.3.2	Indeks Pemberdayaan Gender	75	82	109

IDG merupakan indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi di Kota Mojokerto sudah cukup baik.

2.1.3.3 Persentase anggaran responsive gender (AGR)

diharapkan semua OPD ada Anggaran yang Responsif gender

Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Persentase anggaran responsive gender (AGR) :

Jumlah OPD yang ada Anggaran Responsif Gender

----- x 100

Jumlah OPD yang ada

Tabel 3.8

Capaian Kinerja Indikator Persentase anggaran responsive gender (AGR)

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN		2018		
		Target	Realisasi	Capaian
(1)		(2)	(3)	(4)
2.1.3	Menurunnya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki			
	2.1.3.3 Persentase anggaran responsive gender (AGR)	70	50	71

PPRG merupakan serangkaian cara dan pendekatan untuk mengintegrasikan perspektif gender di dalam proses perencanaan dan penganggaran perencanaan yang responsive gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan anak dari 36 OPD di Kota Mojokerto baru 50% yang telah menyusun dokumen PPRG pada tahun 2018.

Tujuan-2. Meningkatkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pembangunan dan meningkatkan kualitas penanganan Kasus KDRT. dengan Sasaran Pembangunan :

1. Meningkatnya pengetahuan SDM aparatur untuk Peningkatan kualitas pelayanan dan penanganan Kasus KDRT.
2. Meningkatnya penanganan berbagai kasus kekerasan dan trafiking terhadap perempuan dan anak

2.2.1 Sasaran Meningkatnya pengetahuan SDM aparatur untuk Peningkatan kualitas pelayanan dan penanganan Kasus KDRT.

Capaian masing-masing indikator kinerja pada sasaran-1 adalah sebagai berikut :

2.2.1.1 1. Persentase kasus KDRT yang ditindaklanjuti (Target 90 %)

sering kali terjadi kekerasan terhadap Perempuan dan anak

Pengukuran Capaian Kinerja Indikator 1. Persentase kasus KDRT yang ditindaklanjuti (Target 90 %) :

Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak yang terselesaikan

----- x 100

Pengaduan perlindungan perempuan dan anak di P2TP2A

Tabel 3.9

Capaian Kinerja Indikator 1. Persentase kasus KDRT yang ditindaklanjuti (Target 90 %)

		SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN		2018	
			Target	Realisasi	Capaian
		(1)	(2)	(3)	(4)
2.2.1		Meningkatnya pengetahuan SDM aparatur untuk Peningkatan kualitas pelayanan dan penanganan Kasus KDRT.			
	2.2.1.1	1. Persentase kasus KDRT yang ditindaklanjuti (Target 90 %)	90	100	111

Sebab Table Capaian Kinerja Indikator Rata - Rata 100 %

2.2.1.2 Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang diselesaikan oleh P2TP2A

sering kali terjadi kekerasan terhadap Perempuan dan anak

Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang diselesaikan oleh P2TP2A :

Jumlah pengaduan Perlindungan perempuan dan anak yang terelesaikan

----- x 100

Pengaduan perlindungan perempuan dan anak di P2TP2A

Tabel 3.10

Capaian Kinerja Indikator Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang diselesaikan oleh P2TP2A

		SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN	2018		
			Target	Realisasi	Capaian
		(1)	(2)	(3)	(4)
2.2.1		Meningkatnya pengetahuan SDM aparatur untuk Peningkatan kualitas pelayanan dan penanganan Kasus KDRT.			
	2.2.1.2	Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang diselesaikan oleh P2TP2A	90	100	111

Sebab Table Capaian Kinerja Indikator Rata - Rata 100 %

2.2.1.3 Predikat Kota Layak Anak (KLA)

Anak adalah masa depan generasi oleh karenanya perlu adanya pemenuhan hak anak agar bisa tumbuh dewasa sesuai dengan kebutuhannya

Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Predikat Kota Layak Anak (KLA) :

seberapa banyak partisipasi pemerintah dan swasta dalam menciptakan arena permainan untuk anak-anak.

Tabel 3.11

Capaian Kinerja Indikator Predikat Kota Layak Anak (KLA)

		SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN	2018		
			Target	Realisasi	Capaian
		(1)	(2)	(3)	(4)
2.2.1		Meningkatnya pengetahuan SDM aparatur untuk Peningkatan kualitas pelayanan dan penanganan Kasus KDRT.			
	2.2.1.3	Predikat Kota Layak Anak (KLA)	Pratama	Pratama	100

Kota Mojokerto berhasil meraih predikat Kota Layak Anak Pratama

2.2.2 Sasaran Meningkatnya penanganan berbagai kasus kekerasan dan trafiking terhadap perempuan dan anak

Capaian masing-masing indikator kinerja pada sasaran-2 adalah sebagai berikut :

2.2.2.1 Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang diselesaikan oleh P2TP2A

Karena sering terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak

Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang diselesaikan oleh P2TP2A :

Jumlah pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sudah diselesaikan

----- x 100

Total pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak

Tabel 3.12

Capaian Kinerja Indikator Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang diselesaikan oleh P2TP2A

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN		2018		
		Target	Realisasi	Capaian
(1)		(2)	(3)	(4)
2.2.2	Meningkatnya penanganan berbagai kasus kekerasan dan trafiking terhadap perempuan dan anak			
2.2.2.1	Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang diselesaikan oleh P2TP2A	90	100	111

Sebab Table Capaian Kinerja Indikator Rata - Rata 100 %

2.2.2.2 Predikat Kota Layak Anak (KLA)

Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Predikat Kota Layak Anak (KLA) :

Tabel 3.13

Capaian Kinerja Indikator Predikat Kota Layak Anak (KLA)

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN		2018		
-------------------------------	--	------	--	--

			Target	Realisasi	Capaian
		(1)	(2)	(3)	(4)
2.2.2		Meningkatnya penanganan berbagai kasus kekerasan dan trafiking terhadap perempuan dan anak			
	2.2.2.2	Predikat Kota Layak Anak (KLA)	Pratama	Pratama	100

Kota Mojokerto berhasil meraih predikat Kota Layak Anak Pratama

B. REALISASI ANGGARAN

Sebagaimana termuat dalam perjanjian kinerja Pemerintah Kota Mojokerto, bahwa dalam rangka pencapaian sasaran strategis diperlukan anggaran, yang realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.14

REALISASI ANGGARAN

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1.	Menurunnya Perkawinan Usia Istri dibawah 20 tahun (Terwujudnya Pendewasaan Usia Perkawinan)	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	132,059,950	54,261,000	41.09
2.		Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan	29,999,900	0	0.00

		konseling KRR			
3.	Meningkatnya cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif.	Program Keluarga Berencana	1,030,224,700	431,428,900	41.88
4.		Program Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	137,180,000	155,394,200	113.28
5.		Program pengembangan model operasional BKB Posyandu PADU	16,683,600	0	0.00
6.	Meningkatnya cakupan peserta KB Aktif Metode Jangka Panjang (MKJP)	Program Pelayanan kontrasepsi	260,320,750	60,046,800	23.07
7.		Program Pembinaan peran serta Masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	142,300,000	108,914,600	76.54
8.		Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	59,156,400	48,000,000	81.14
9.	Meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	655,810,700	473,716,900	72.23

10.	Meningkatnya penanganan berbagai kasus kekerasan dan trafiking terhadap perempuan dan anak	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan jender dan anak	312,556,450	92,668,630	29.65
11.	Menurunnya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki	Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	37,199,950	17,277,950	46.45

Sebagaimana termuat dalam perjanjian kinerja Pemerintah Kota Mojokerto, bahwa dalam rangka pencapaian sasaran strategis diperlukan anggaran, yang realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.15

Perbandingan capaian kinerja dan anggaran tahun

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	CAPAIN EFISIEN
1.	Menurunnya Perkawinan Usia Istri dibawah 20 tahun (Terwujudnya Pendewasaan Usia Perkawinan)	100%	21%	487%
2.	Meningkatnya cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif.	100%	52%	193%
3.	Meningkatnya cakupan peserta KB Aktif Metode Jangka Panjang (MKJP)	107%	60%	178%
4.	Meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan	100%	72%	138%

5.	Meningkatnya penanganan berbagai kasus kekerasan dan trafiking terhadap perempuan dan anak	106%	30%	356%
6.	Menurunnya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki	94%	46%	203%

Anggaran yang efisien adalah jika capaian kinerjanya lebih besar dari capaian anggarannya, Sehingga dari kedua belas sasaran strategis, ada 2 sasaran yang belum efisien yaitu Meningkatnya investasi Penanaman Modal dan Menurunnya kemiskinan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Mojokerto disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban **dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana Kota Mojokerto** berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2018 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun kedepannya.

Berdasarkan uraian Capaian Kinerja Sasaran pada Bab III **dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana** realisasi kinerjanya sudah memenuhi dari target yang sudah ditetapkan.

B. UPAYA PERBAIKAN

Adapun sebagai upaya **dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana** akan mempertahankan yang perlu dilakukan oleh **dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana Kota Mojokerto**.

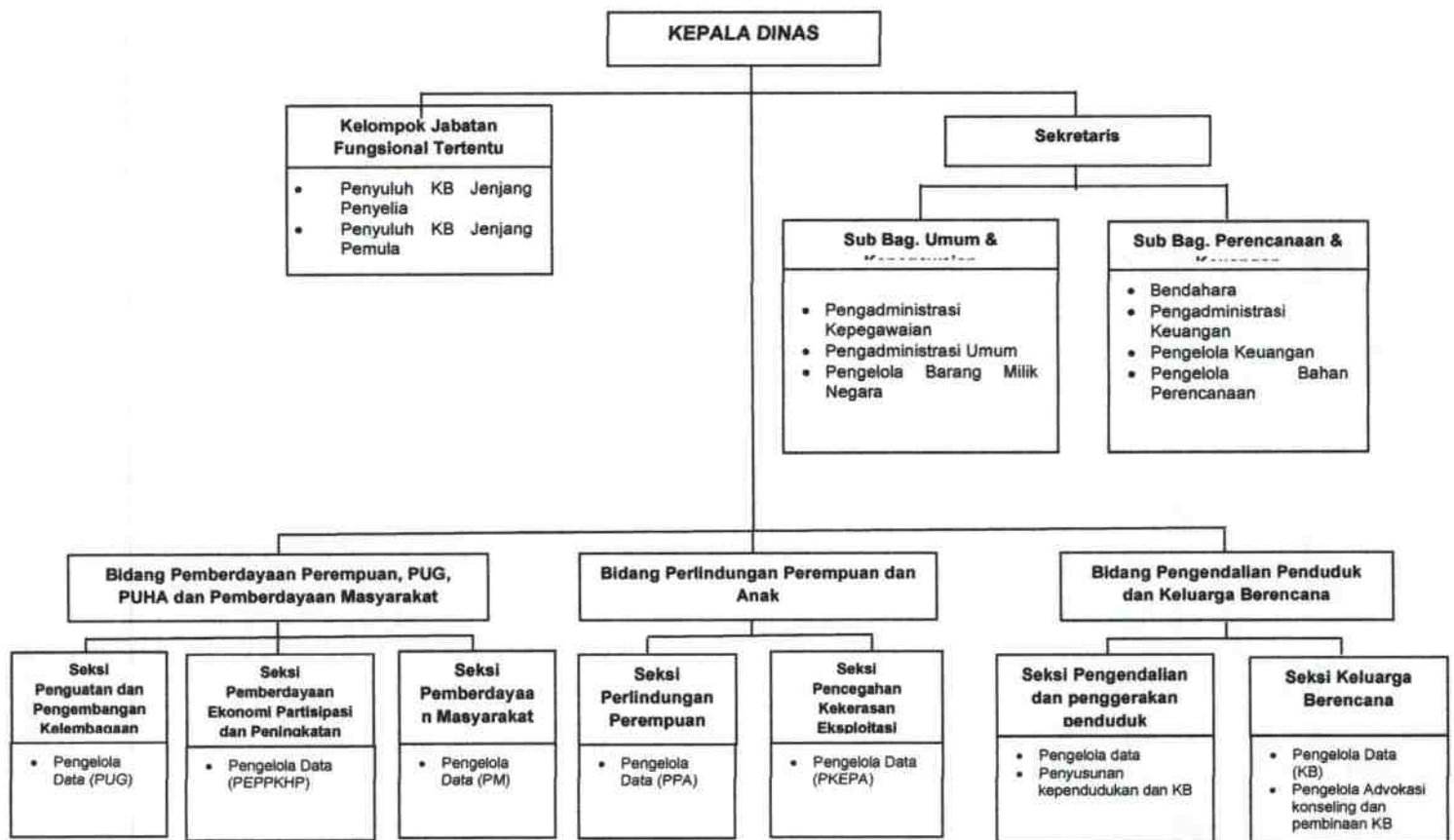
**LAPORAN KINERJA PEJABAT ADMINISTRATOR
SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA**

**BAB I
PENDAHULUAN**

- (1) SEKRETARIS mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan, perencanaan dan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum serta mengkoordinasikan secara teknis dan administratif pelaksanaan dinas.
1. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan Renstra dan Renja, RKA, dan PK;
 - b. Penyusunan dan pelaksanaan DPA dan DPPA;
 - c. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
 - d. Pelaksanaan urusan rumah tangga, administrasi dan pembinaan kepegawaian;
 - e. Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - f. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - g. Pengelolaan anggaran belanja, pelaksanaan administrasi keuangan, pembayaran gaji pegawai dan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
 - h. Pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - i. Penyusunan dan pelaksanaan SP dan SOP;
 - j. Pelaksanaan SPI dan SKM dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;

- k. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah;
- l. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *website* Pemerintah Daerah;
- m. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

STRUKTUR ORGANISASI DARI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MOJOKERTO adalah :



(1) BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Sekretaris Dinas P3AKB Tahun 2018 sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Presentase Penyerapan Anggaran sesuai dengan target 2. Prosentase sarana dan Prasarana yang baik 3. prosentase laporan tepat waktu 4. Prosentase dokumen kepegawaian tepat waktu 5. Prosentase Perencanaan masuk menjadi DPA	95 % 90 % 95 % 95 % 90 %

Perjanjian Kinerja Sekretaris Dinas P3AKB tahun 2019 sebagai berikut :

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	1. Presentase Penyerapan Anggaran sesuai dengan target 2. Prosentase sarana dan Prasarana yang baik 3. prosentase laporan tepat waktu 4. Prosentase dokumen kepegawaian tepat waktu 5. Prosentase Perencanaan masuk menjadi DPA	95 % 90 % 95 % 95 % 90 %

B. Capaian Kinerja

FORMAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2018	REALISASI 2018	CAPAIAN (%)
1	3	4	5	10	11
1	1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Presentase Penyerapan Anggaran sesuai dengan target 2 Prosentase sarana dan Prasarana yang baik 3 prosentase laporan tepat waktu 4 Prosentase dokumen kepegawaian tepat waktu 5 Prosentase Perencanaan masuk menjadi DPA	95 % 90 % 95 % 95 % 90 %	81,80 % 83 % 100 % 100 % 100 %	86,11% 95 % 105,26 % 105,26 % 105,26 %

FORMAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN S/D Juni 2019 (%)
1	3	4	5	10	11
1	1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Presentase Penyerapan Anggaran sesuai dengan target 2 Prosentase sarana dan Prasarana yang baik 3 prosentase laporan tepat waktu 4 Prosentase dokumen kepegawaian tepat waktu 5 Prosentase Perencanaan masuk menjadi DPA	95 % 90 % 95 % 95 % 90 %		

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran pada Sekretariat Dinas P3AKB Tahun 2018 dapat disajikan sebagai berikut :

Sasaran Strategis : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi perkantoran

Perjanjian Kinerja Sekretaris Dinas P3AKB mempunyai satu sasaran Yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan indikator kinerja sebagai berikut :

- | | | |
|--|---|------|
| 1. Presentase Penyerapan Anggaran sesuai dengan target | : | 95 % |
| 2. Prosentase sarana dan Prasarana yang baik | : | 90 % |
| 3. prosentase laporan tepat waktu | : | 95 % |
| 4. Prosentase dokumen kepegawaian tepat waktu | : | 95 % |
| 5. Prosentase Perencanaan masuk menjadi DPA | : | 90 % |

Keberhasilan Indikator ini dapat ditunjang dengan program kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran dari anggaran Rp. 930.137.450,- sampai akhir tahun 2018 dapat tercapai Rp 770.931.507,- atau 82,88 %.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dari anggaran Rp. 41.166.850,- sampai akhir tahun 2018 dapat tercapai Rp. 41.000.000,- atau 99,59 %
3. Program Peningkatam Disiplin Aparatur terdapat anggaran Rp 9.820.000,- sampai akhir tahun 2018 dapat dicapai Rp. 8.310.000,- atau 84,62 %.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur terdapat anggaran Rp. 29.515.550,- sampai akhir tahun 2018 dapat tercapai Rp 28.025.550,- atau 94,95 %
5. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan terdapat anggaran Rp. 3.904.050,- sampai akhir tahun 2018 tercapai Rp 3.904.050,- atau 100 %

6. Program Keluarga Berencana dengan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Program Keluarga Berencana terdapat anggaran Rp. 574.830.000,- sampai akhir tahun 2018 tercapai Rp 447.862.850,- atau 77,91 %.

Dengan melihat capaian sasaran dan indikator kinerja Sekretaris Dinas P3AKB yang didukung dengan 6 (enam) Program yang ada dengan total anggaran Rp. 1.589.373.900,- sampai akhir tahun anggaran 2018 dapat terealisasi Rp. 1.300.033.957,- atau 81,80 %. Hal ini disebabkan adanya efisiensi anggaran dan menyesuaikan kebutuhan.

Sedangkan untuk capaian sasaran kinerja tahun 2019 sebagai berikut :

Dari total anggaran yang ada di sekretariat Dinas P3AKB sebesar Rp. 2.056.898.600,-

D. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut, sebagai berikut :

Dilakukan peningkatan kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pembinaan terhadap kinerja dan kelembagaan SKPD DP3AKB Kota Mojokerto.

Akan mengadakan survey Kepuasan Pelayanan yang ada di Dinas DP3AKB Kota Mojokerto.

E. Tanggapan Atasan Langsung

RUANG TANGGAPAN (DISPOSISI) ATASAN LANGSUNG

<input type="text"/>	Laporan kurang baik	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Laporan sudah baik	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Laporan diperbaiki	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Realisasi diteliti ulang	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Capaian diteliti ulang	<input type="text"/>

BAB
PENUTUP

Capaian kinerja Sekretaris pada Dinas pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, dapat disimpulkan secara umum bahwa telah tercapai kinerja sesuai target yang telah ditentukan.

Mengetahui,

Atasan Langsung

Kepala Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak dan KB



MOCH. IMRON, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19720828 199201 1 001

Tanggal, 28 Januari 2019

Sekretaris Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan anak dan KB

DRA. HARTINI, MM

Pembina Tk.I

NIP. 19640130 199203 2 006

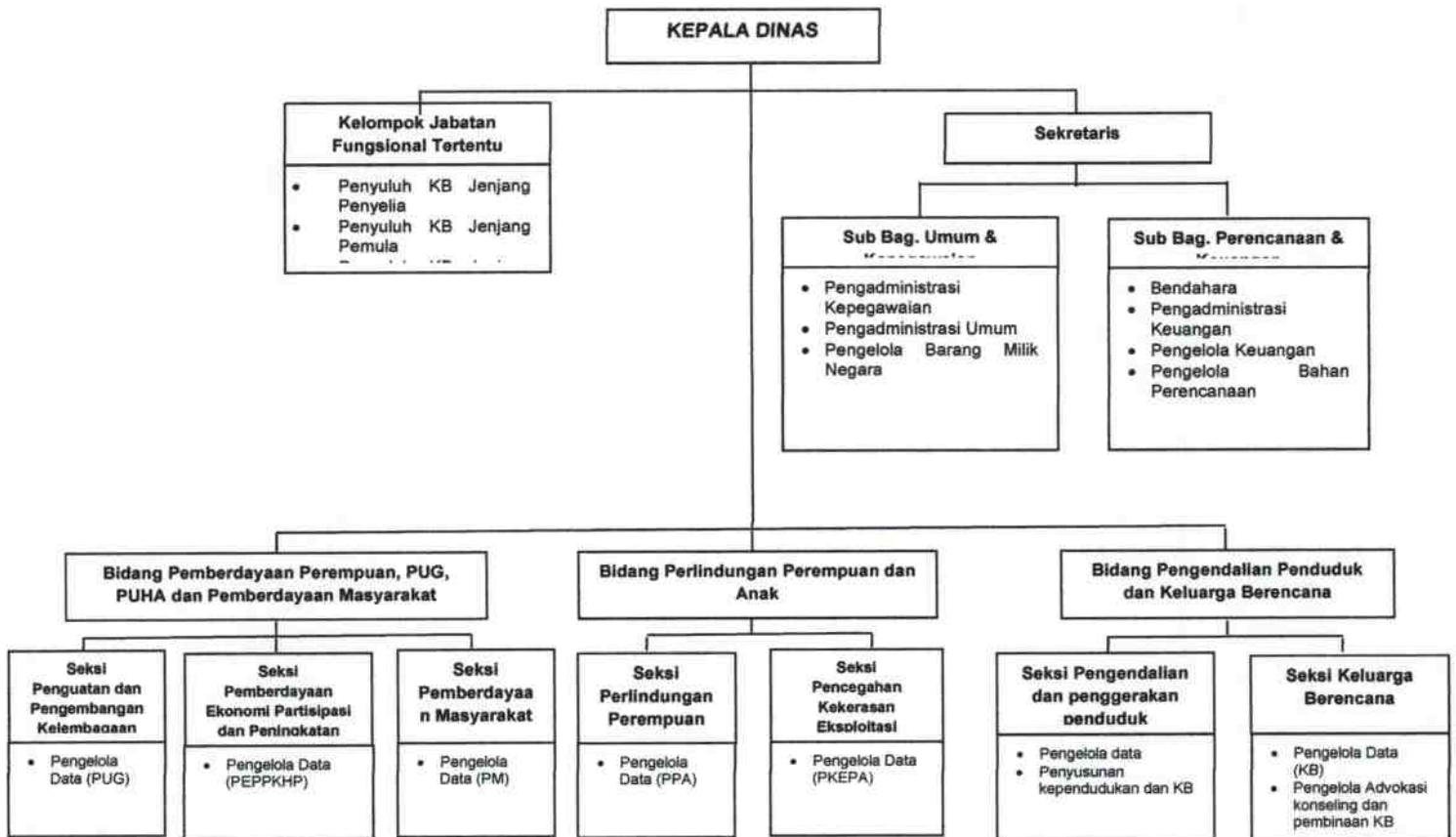
**LAPORAN KINERJA PEJABAT PENGAWAS
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- b. Melaksanakan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan PNS dilingkungan Dinas P3A dan KB
- c. Melaksanakan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
- d. Melaksanakan urusan rumah tangga;
- e. Melaksanakan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- g. Menyusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah;
- h. Pelaksanaan SKM dan/atau melaksanakan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- i. menyampaikan data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *website* Pemerintah Daerah;
- j. Melaksanakan dan memelihara barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- k. Melaksanakan dan penatausahaan barang milik daerah;
- l. Melaksanakan SPI;
- m. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- n. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokoknya
- f. Pelaksanaan DPA dan DPPA;

**PETA JABATAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA
KOTA MOJOKERTO**



BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2018 sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Prosentase laporan tepat waktu	95 %
		2. Prosentase Sarana Prasarana kantor yang baik	90 %
		3. Prosentase KP, KGB, Pensiun tepat waktu	95 %

B. Capaian Kinerja

FORMAT CAPAIAN KINERJA

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	4. Prosentase laporan tepat waktu	95 %	100%	105,26%
	5. Prosentase Sarana Prasarana kantor yang baik	90 %	83 %	95 %
	6. Prosentase KP, KGB, Pensiun tepat waktu	95 %	100 %	105,26 %

Yang dimaksud dengan meningkatkan Kualitas pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu dengan adanya penempatan posisi aparatur yang sesuai dengan tupoksi dan dengan mengikuti pelatihan/ diklat yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan BKKBN, sedangkan terpenuhi sarana dan prasarana PNS yaitu semua kebutuhan PNS baik itu ATK, perangkat kerja berupa PC/Laptop dan suasana gedung kantor yang nyaman. Akan tetapi untuk gedung

Dinas P3A dan KB kurang nyaman karena kondisi gedung yang terlalu kecil sehingga ruang pertemuan untuk rapat staf tidak ada dan kurang mendukung.

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Untuk penyelesaian surat sesuai dengan target, dan untuk penyelesaian dan pengusulan Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala untuk pengusulan berkas ke BKD tepat waktu sesuai dengan yang ditetapkan oleh BKD dan untuk Pensiun sudah tepat waktu sebelum TMT Pensiun sudah selesai.

D. Rencana Tindak Lanjut

Untuk proses Kenaikan pangkat, Gaji Berkala dan pensiun sudah sesuai dengan mekanisme dan TMT PNS sedangkan untuk pelaporan diusahakan menyusun tepat waktu masih diperlukan peningkatan kualitas SDM dan regenerasi yang sesuai dengan kompetensi

E. Tanggapan Atasan Langsung

RUANG TANGGAPAN (DISPOSISI) ATASAN LANGSUNG

<input type="text"/>	Laporan kurang baik	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Laporan sudah baik	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Laporan diperbaiki	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Realisasi diteliti ulang	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Capaian diteliti ulang	<input type="text"/>


BAB
PENUTUP

Pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk tahun 2018 dan 2019, dapat disimpulkan bahwa telah tercapai kinerja sesuai target yang telah ditentukan

Mengetahui,
Atasan Langsung
Sekretaris Dinas P3A Dan KB


Dra. HARTINI, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19640130 199203 2 006

Tanggal, 28 Januari 2019
Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian


KHUSNAH, SH, MM
Pembina
NIP. 19680713 199003 2 007

LAPORAN KINERJA PEJABAT STRUKTURAL ESELON IV

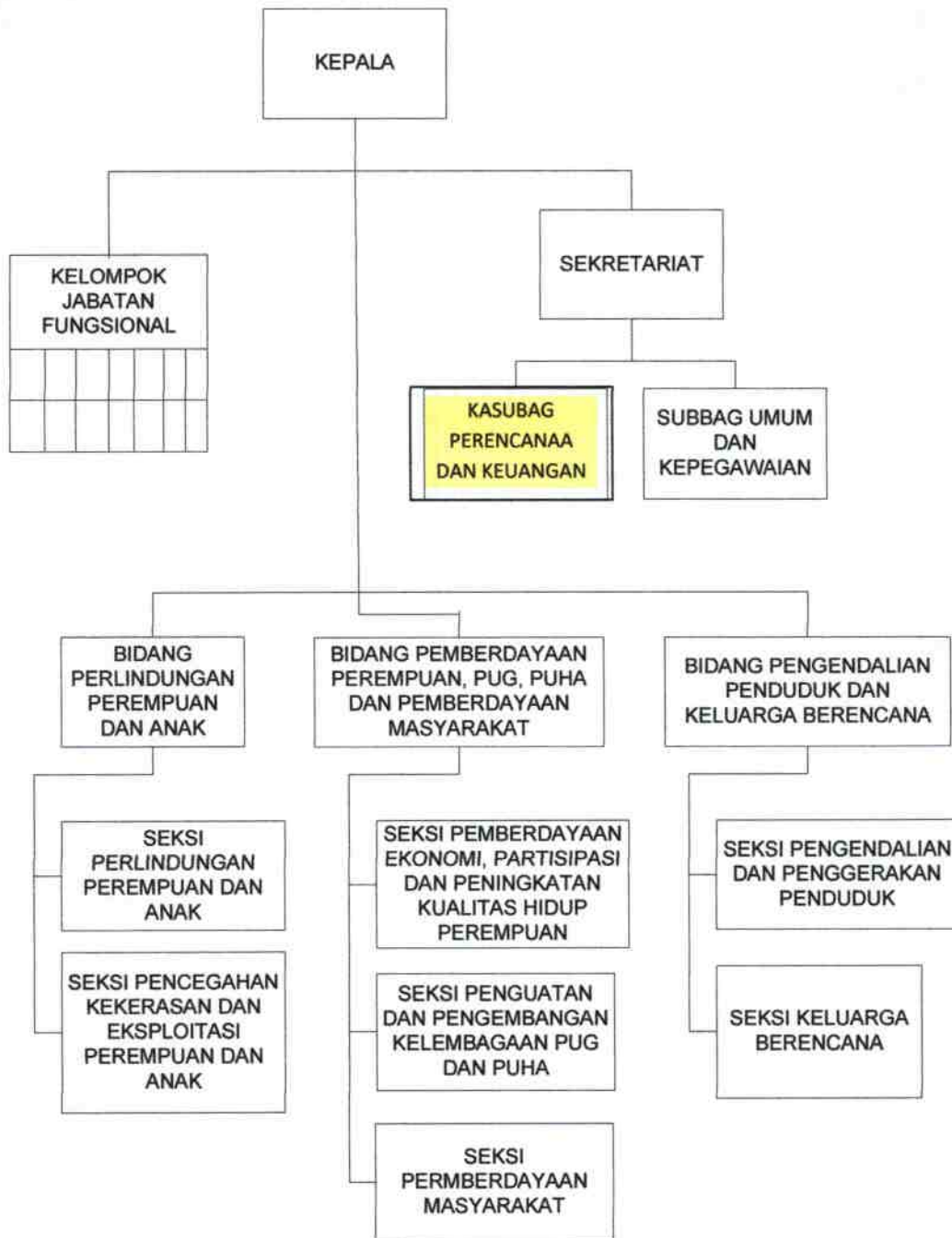
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto mempunyai tugas pokok:

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan melaksanakan tugas pokok perencanaan, pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan
- (2) Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas :
 - a. Penyusunan Renstra dan Renja;
 - b. Penyusunan RKA;
 - c. Penyusunan dan pelaksanaan DPA dan DPPA
 - d. Penyusunan PK;
 - e. Penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
 - f. Penyusunan dan pelaksanaan SP dan SOP;
 - g. Pelaksanaan penatausahaan keuangan;
 - h. Pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
 - i. Penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan anggaran;
 - j. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan semesteran dan akhir tahun;
 - k. Penyusunan administrasi dan pelaksanaan pembayaran gaji pegawai;
 - l. Pelaksanaan SPI;
 - m. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
 - n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokoknya.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MOJOKERTO



AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan tahun 2018 sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Menyediakan jasa administrasi Pengelola Keuangan	1. Prosentase Penyerapan Anggaran sesuai dengan target 2. Persentase Laporan Keuangan tepat waktu	95 % 90 %
2	Meningkatkan kualitas RENSTRA dan RENJA SKPD	Persentase kegiatan di Renja yang menjadi kegiatan di DPA	80 %

B. Capaian Kinerja

FORMAT CAPAIAN KINERJA

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Menyediakan jasa administrasi Pengelola Keuangan	1. Prosentase Penyerapan Anggaran sesuai dengan target	95 %	81,80	86,11 %
	2. Persentase Laporan Keuangan tepat waktu	90 %	100 %	111,1 %
Meningkatkan kualitas RENSTRA dan RENJA SKPD	Persentase kegiatan di Renja yang menjadi kegiatan di DPA	80 %	100 %	125 %

Yang dimaksud dengan Perencanaan dan keuangan adalah kegiatan yang berkenaan dengan Pelaksanaan Penyusunan Renstra dan Renja, Penyusunan RKA, Penyusunan dan pelaksanaan DPA dan DPPA, Penyusunan PK, Penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan serta penatausahaan keuangan, Pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan, Penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan anggaran, Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan semesteran dan akhir tahun, Penyusunan administrasi dan pelaksanaan pembayaran gaji pegawai, Pelaksanaan SPI dan Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

C. Eavaluasi dan Analisa Kinerja

Keberhasilan kinerja untuk ketersediaan tenaga pengelola keuangan dan ketepatan waktu dalam penyapaian laporan perlu dipertahankan dan juga ditingkatkan untuk dimasa mendatang.

D. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan keberhasilan diperlukan adanya regenerasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai kompetensi.

E. Tanggapan Atasan Langsung

RUANG TANGGAPAN (DISPOSISI) ATASAN LANGSUNG

<input type="text"/>	Laporan Kurang Baik	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Laporan Sudah baik	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Laporan diperbaiki	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Realisasi diteliti ulang	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Capaian diteliti ualng	<input type="text"/>

BAB III
PENUTUP

Pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa telah sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Mengetahui,
Atasan Langsung
Sekretaris,


Dra. HARTINI, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19640130 199203 2 006

Tanggal, 28 Januari 2019

Kepala Sub Bagian Perencanaan
dan Keuangan


Drs. MOH. FAUZI, MM
Pembina
NIP. 19611223 198202 1 005

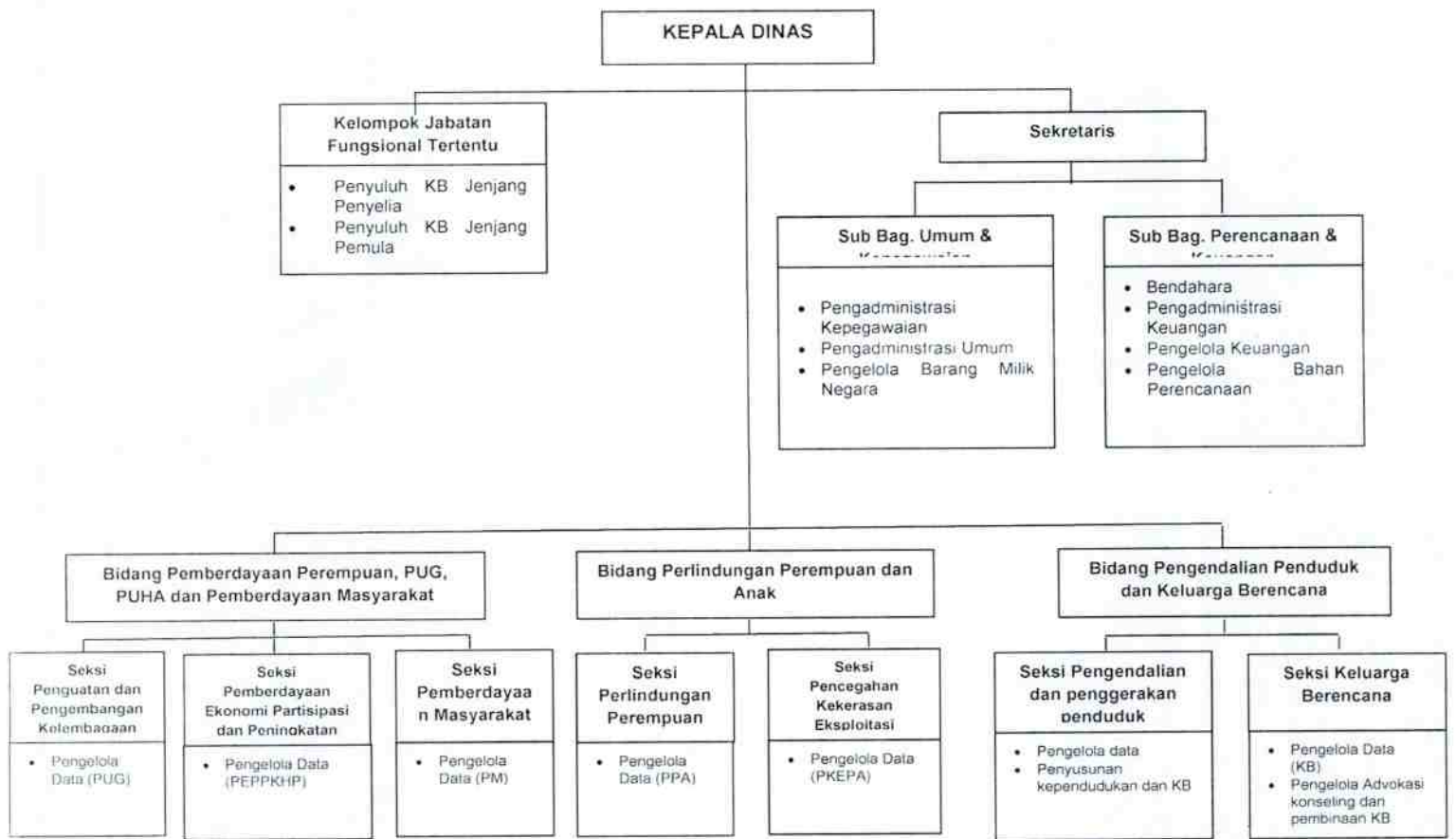
**LAPORAN KINERJA PEJABAT ADMINISTRATOR
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA**

**BAB I
PENDAHULUAN**

- (1) BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA mempunyai tugas melakukan pengelolaan kebijakan teknis, koordinasi, dan pembinaan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
1. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengendalian Penduduk dan KB mempunyai fungsi:
- a. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - c. Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi;
 - d. Penyelenggaraan pelayanan, pembinaan, bimbingan teknis, fasilitasi, jaminan, rujukan Keluarga Berencana;
 - e. Pelaksanaan perumusan, pemaduan dan Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kota dalam rangka Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - f. Pelaksanaan Norma, Standart, Prosedure dan Kriteria (NSPK) bidang kebijakan pengelolaan dan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - g. Penyelenggaraan Advokasi, KIE, Koordinasi, Sinkronisasi dan Fasilitasi kebijakan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- h. Penyelenggaraan Pemantauan, dan Evaluasi pelaksanaan program dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- i. Penyelenggaraan Pembinaan, Pelatihan, Pembimbingan dan Fasilitasi kepada Institusi Masyarakat, Mitra Kerja yang terkait di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- j. Penyelenggaraan Pembinaan, Pelatihan Teknis untuk peningkatan Sumberdaya Manusia bagi Kader Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- k. Pengembangan desain melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- l. Penyelenggaraan Pembinaan Kelompok Remaja / Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR);
- m. Pembinaan Kesertaan Ber-KB dan Kesehatann Reproduksi (KR);
- n. Pengelolaan data pengendalian penduduk dan Keluarga berencana;
- o. Pelaksanaan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB;
- p. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
- q. Pelaksanaan Standart Pelayanan Publik (SPP) dan Standart Operasional Prosedur (SOP);
- r. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan
- s. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

STRUKTUR ORGANISASI DARI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MOJOKERTO



BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dinas P3AKB Kota Mojokerto Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk Melalui Program KB	1 Prosentase Perkawinan Isteri dibawah 20 Tahun.	16 %
		2. Cakupan Sasaran PUS menjadi Peserta KB Aktif.	75 %
		3. Cakupan Peserta KB Aktif MKJP	34,4 %

B. Capaian Kinerja

Untuk mengetahui hasil capaian Kinerja Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dinas P3AKB Kota Mojokerto Tahun 2018 dapat dilihat dalam tabel Format Capaian Kinerja dibawah ini :

FORMAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	CAPAIAN 2018 (%)
1	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk Melalui Program KB	1. Prosentase Perkawinan Isteri dibawah 20 Tahun.	16 %	13,80 %	86,25 %
		2. Cakupan Sasaran PUS menjadi Peserta KB Aktif.	75 %	75,08 %	100,11 %
		3. Cakupan Peserta KB Aktif MKJP	34,4 %	37,08 %	107,79 %

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap hasil capaian kinerja pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas P3AKB 2018 dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut :

**Sasaran : Menurunnya laju pertumbuhan Penduduk
Melalui Program KB**

Pada perjanjian Kinerja Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas P3AKB dimana sasarannya Yaitu **Menurunnya laju pertumbuhan Penduduk Melalui Program KB** yang di dalamnya ditandai dengan 3 indikator kinerja yaitu :

1. Prosentase Perkawinan Isteri dibawah 20 Tahun.
2. Cakupan Sasaran PUS menjadi Peserta KB Aktif.
3. Cakupan Peserta KB Aktif MKJP.

Dari ketiga indikator tersebut hasil capaian kinerjanya secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

Ringkasan Capaian Sasaran Kinerja

Memperhatikan hasil capaian kinerja yang terdapat dalam format capaian kinerja Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas P3AKB tahun 2018 ini terhadap hasil capaian antara realisasi dan target masing-masing indikator kinerja dalam mendukung terwujudnya Sasaran menurunnya laju pertumbuhan penduduk di Kota Mojokerto dapat diberikan penjelasan secara ringkas sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja prosentase Perkawinan Isteri dibawah 20 Tahun

Berdasarkan data laporan Usia Kawin Pertama Penduduk Wanita Kota Mojokerto yang terjadi selama tahun 2018, sebagaimana yang termuat dalam Perjanjian kinerja antara Kepala Bidang Dalduk dan KB dengan Kepala Dinas P3AKB dimana prosentase perkawinan isteri dibawah 20 tahun targetnya sebesar 16 % dalam realisasinya dari jumlah perkawinan yang terjadi selama tahun 2018 sebanyak 978 perkawinan, pencapaian perkawinan istri dibawah 20 tahun jumlahnya sebanyak 135 perkawinan atau sebesar 13,80 %, angka

prosentasenya dibawah target tersebut. Dengan hasil capaian kinerja sebesar 86,25 % dari target. Hal ini menunjukkan bahwa angka pencapaiannya dibawah angka target kinerja tersebut bukan berarti upaya menurunkan perkawinan dibawah 20 tahun mengalami kegagalan, justru hal ini menunjukkan keberhasilan karena kita dapat menekan terjadinya perkawinan penduduk wanita usia dibawah 20 tahun sebesar 13,75 %

2. Indikator Kinerja Cakupan Sasaran PUS menjadi Peserta KB Aktif.

Sebagai upaya dalam meningkatkan cakupan peserta KB aktif di Kota Mojokerto, sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2018 yg telah dibuat dengan target indikator kinerja sebesar 75 % dengan harapan dapat membawa dampak pada upaya menurunkan laju pertumbuhan penduduk di Kota Mojokerto melalui program KB maka pada tahun 2018 dari jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang ada di Kota Mojokerto sebanyak 20.107 PUS dapat direalisasikan menjadi peserta KB Aktif sebanyak 15.096 atau 75,08 % sehingga hasil capaian kinerjanya sebesar 100,11 %. Dengan hasil capaian kinerja seperti itu tentunya sudah melebihi dari target yang telah ditetapkan meskipun selisihnya kecil sekali yaitu hanya 0,11 %. Dengan capaian sebesar itu berarti target indikator kinerja tahun 2018 ini telah dapat tercapai. Perlu dilaporkan juga disini bahwa upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan cakupan peserta KB aktif adalah berupa kegiatan-kegiatan pelayanan KB, selain dilakukan melalui kegiatan pelayanan KB rutin di berbagai fasilitas pelayanan KB (Faskes KB) yang tersebar diberbagai tempat juga dilakukan melalui kegiatan pelayanan KB yang bersifat momentum misalnya pelayanan KB dalam rangka Satrak PKK, Harganas, Gelar Bhakti IBI dan lain-lain yang merupakan kegiatan pelayanan KB masal yang terpusat disatu tempat Fasilitas pelayanan KB yang telah ditentukan.

3. Indikator Kinerja Cakupan Peserta KB Aktif MKJP.

Selain meningkatkan cakupan peserta KB aktif yang merupakan peningkatan peserta KB aktif untuk semua jenis metode kontrasepsi maka diperlukan juga meningkatkan cakupan peserta KB aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) karena dengan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang

secara teoritis berpengaruh besar terhadap terjadinya drop out menjadi peserta KB aktif bahkan berdasarkan penelitian penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) ini mempunyai pengaruh besar terhadap laju pertumbuhan penduduk. Pada perjanjian kinerja tahun 2018 ini target indikator kinerja cakupan peserta KB aktif MKJP ditetapkan sebesar 34,4 % dan sampai dengan bulan Desember 2018 ini dari jumlah peserta KB Aktif semua metode sebanyak 15.096 akseptor realisasinya sebanyak 5.597 akseptor atau sebesar 37,08 % atau dengan hasil capaian kinerja sebesar 107,79 %. Dengan demikian capaian indikator kinerja cakupan peserta KB Aktif MKJP 2018 ini telah melampaui target yang ditetapkan yaitu 7,79 %.

D. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan, sebagai berikut :

Dengan melihat capaian indikator kinerja yang telah diuraikan secara ringkas diatas maka sudah tentu tetap diperlukan adanya tindak lanjut atas capaian indikator kinerja tahun 2018 dengan maksud dan tujuan untuk lebih meningkatkan capaian kinerja yang telah ditetapkan pada tahun - tahun yang akan datang. Oleh karena itu adanya peningkatan kegiatan pelayanan KB khususnya MKJP, Advokasi dan KIE, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pembinaan terhadap Akseptor KB, kinerja dan kelembagaan Dinas P3AKB Kota Mojokerto sesuai tugas dan fungsinya perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan.

E. Tanggapan Atasan Langsung

RUANG TANGGAPAN (DISPOSISI) ATASAN LANGSUNG

<input type="text"/>	Laporan kurang baik	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Laporan sudah baik	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Laporan diperbaiki	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Realisasi diteliti ulang	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Capaian diteliti ulang	<input type="text"/>

BAB III
PENUTUP

Dengan melihat capaian kinerja Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana diatas, dapat disimpulkan bahwa secara umum target kinerja yang telah ditetapkan telah tercapai kinerja sesuai dengan yang direncanakan

Mengetahui,
Atasan Langsung
Kepala Dinas P3AKB Kota Mojokerto



MOCHIMIRON S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19720828 199201 1 001

Mojokerto, 25 Januari 2019
Kabid Dalduk dan KB
Dinas P3AKB Kota Mojokerto



DJUNAEDI, SH, MM
Pembina
NIP. 19650616 199203 1 011

**LAPORAN KINERJA PEJABAT PENGAWAS
SEKSI KELUARGA BERENCANA**

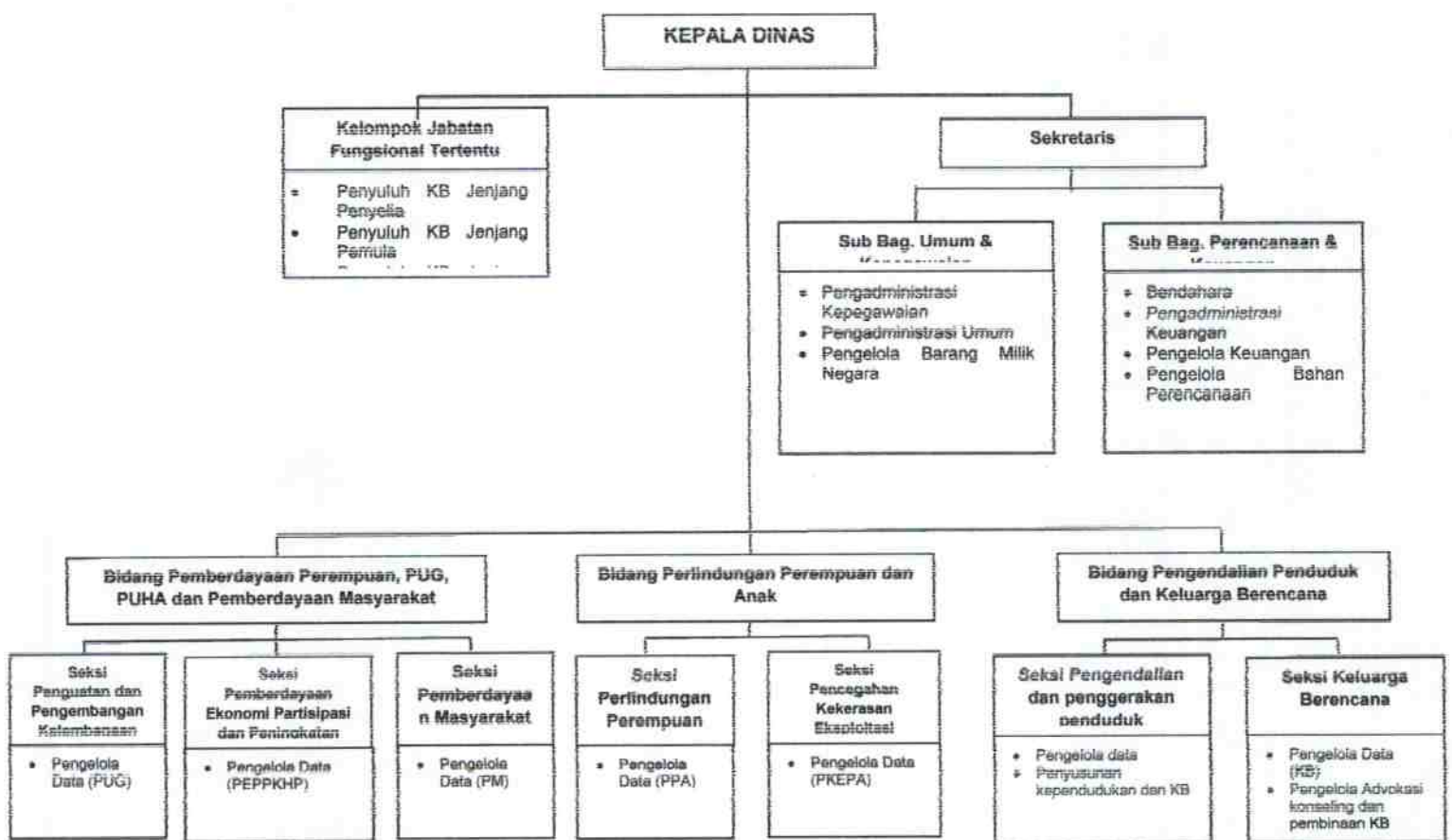
**BAB I
PENDAHULUAN**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan bahan dalam rangka pelaksanaan pelayanan dan pembinaan di bidang keluarga berencana;
- b. Menyusun kebijakan teknis dan rencana program di bidang keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi;
- d. Melaksanakan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) di bidang keluarga berencana;
- e. Melaksanakan dan Pendayagunaan Penyuluh KB dan Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP);
- f. Melaksanakan Pembinaan dan Pelatihan Teknis untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Pelaksana program Keluarga Berencana;
- g. Melaksanakan kerjasama teknis dalam pelaksanaan dan jaminan pelayanan Keluarga Berencana dengan unit – unit pelayanan Keluarga Berencana;
- h. Melaksanakan pelayanan, pembinaan, bimbingan teknis fasilitasi, jaminan, rujukan Keluarga Berencana
- i. Melaksanakan Konseling dalam pelayanan Keluarga Berencana ;
- j. Pembinaan kesertaan ber - KB dan Kesehatan Reproduksi (KR);
- k. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dan organisasi kemasyarakatan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- l. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala;
- m. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);

- n. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) ;
- o. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan
- p. Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**PETA JABATAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA MOJOKERTO**



BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Keluarga Berencana tahun 2018 sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk melalui program KB	1. Cakupan Peserta KB Aktif 2. Cakupan Peserta KB Aktif MKJP	75 % 30 %

B. Capaian Kinerja

FORMAT CAPAIAN KINERJA

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Menurunnya laju Pertumbuhan Penduduk melalui Program KB	Prosentase Cakupan KB Aktif	75 %	75,08 %	100,11 %
	Prosentase Cakupan Peserta KB Aktif MKJP	34,4 %	37,08 %	107,79 %

Yang dimaksud dengan Cakupan KB Aktif adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi Peserta KB tanpa diselingi dengan Kehamilan, sedangkan Cakupan Peserta KB Aktif MKJP adalah Peserta KB Aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yaitu MOW, MOP, IUD dan IMPLANT.

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Untuk target Cakupan Peserta KB Aktif dan Cakupan Peserta KB Aktif MKJP Realisasi sampai dengan bulan Desember 2018 : Peserta KB Aktif 75,08 % (15.096 Akseptor) dari PUS sebesar 20.107 , Sedangkan Peserta KB Aktif MKJP 37,08 % dari Peserta Aktif Sebesar 15.096.

Capaian Kinerja Prosentase Cakupan Peserta KB Aktif sampai dengan bulan Desember 2018 adalah 100,11 %.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan antara lain : Pelayanan KB dalam rangka Satrak PKK KB - KES, HARGANAS dan IBI, Juang Kartika (TNI) Pelayanan KB Kontak (Kontrasepsi Mantap) di RSUD dan Pelayanan KB sewaktu - waktu disetiap FASKES. Untuk Sasaran di 18 Wilayah Kelurahan Se Kota Mojokerto.

D. Rencana Tindak Lanjut :

Memfaatkan kegiatan yang ada serta meningkatkan Kegiatan / Program KB dilingkungan / wilayah Kampung KB.

E. Tanggapan Atasan Langsung

RUANG TANGGAPAN (DISPOSISI) ATASAN LANGSUNG

<input type="text"/>	Laporan kurang baik	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Laporan sudah baik	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Laporan diperbaiki	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Realisasi diteliti ulang	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Capaian diteliti ulang	<input type="text"/>

PENUTUP

Pada kepala Seksi Keluarga Berencana , untuk tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa telah tercapai kinerja sesuai target yang telah ditentukan.

Mengetahui,

Atasan Langsung
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana



DJUNAEDI, SH, MM
Pembina
NIP. 19650616 199203 1 011

Tanggal, 25 Januari 2019
Kepala Seksi Keluarga Berencana



SUHARTI, S.Sos, MM
Pembina
NIP. 19650620 198803 2 016

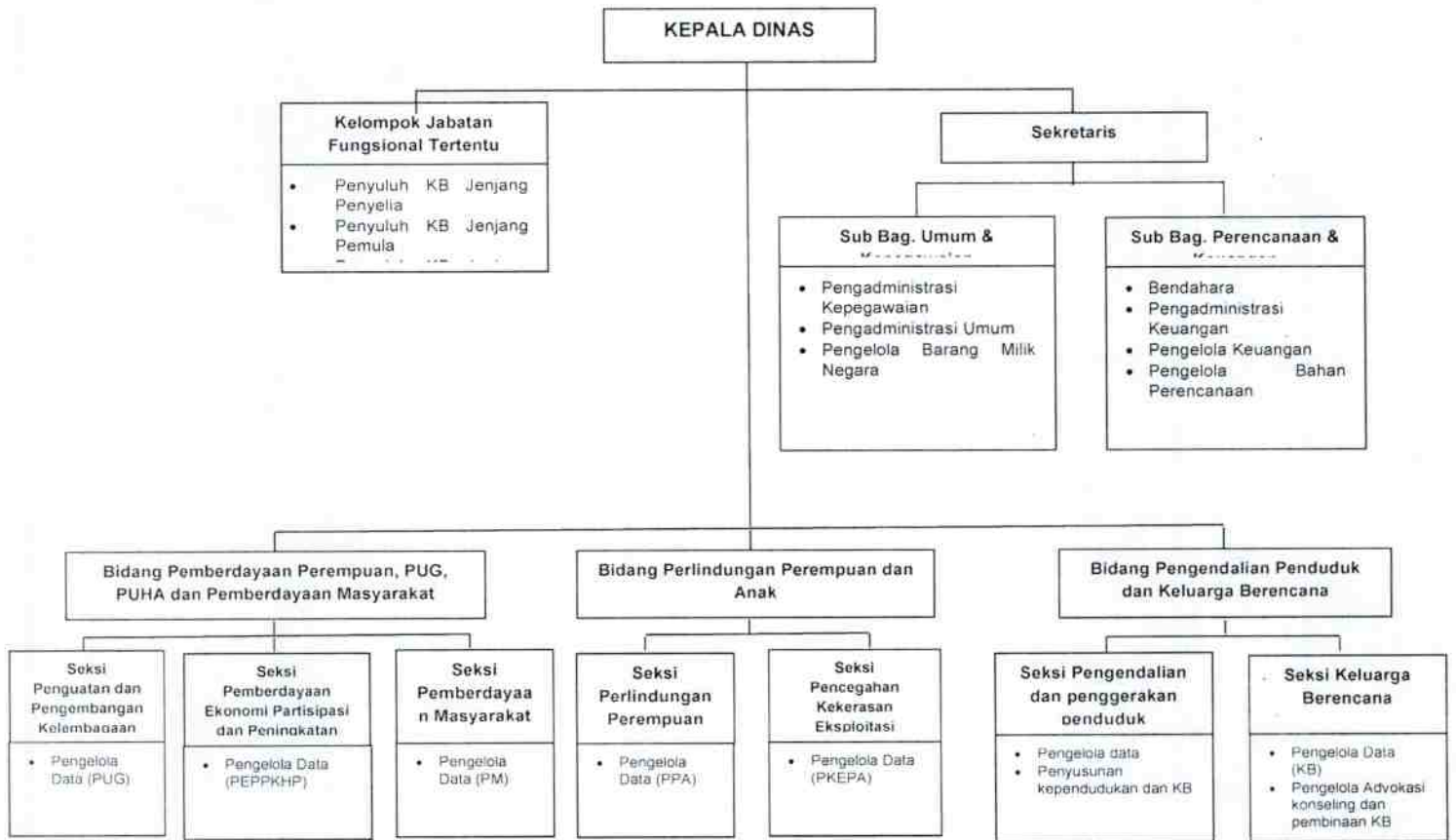
LAPORAN KINERJA PEJABAT PENGAWAS
**SEKSI PENGENDALIAN DAN PENGGERAKAN PENDUDUK
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA**

BAB I
PENDAHULUAN

- (1). Seksi Pengendalian dan Penggerakan Penduduk mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Menyusun kebijakan teknis di bidang pengendalian dan penggerakkan penduduk;
 - b. Menyusun rencana program kerja di bidang pengendalian dan penggerakkan penduduk;
 - c. Mengumpulkan bahan dalam rangka pelaksanaan dan pembinaan ketahanan keluarga sejahtera;
 - d. Melaksanakan Pembinaan dan Pelatihan Teknis untuk Peningkatan Sumber Daya Manusia bagi Kader kelompok Tri Bina (BKB, BKR, BKL) dan UPPKS;
 - e. Melaksanakan Pembinaan Kelompok Remaja / Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR);
 - f. Melaksanakan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) di bidang pengendalian dan penggerakkan penduduk;
 - g. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan penggerakkan penduduk;
 - h. Pelaksanaan NSPK dibidang pengendalian dan penggerakkan penduduk;
 - i. Pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
 - j. Pelaksanaan Pemetaan Perkiraan (Parameter) Pengendalian Penduduk;
 - k. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di bidang Pengendalian dan Penggerakan Penduduk;

- l. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB
- m. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis Pengendalian dan Penggerakan Penduduk;
- n. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah yang berhubungan dengan Pengendalian dan Penggerakan Penduduk;
- o. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait, lembaga non pemerintah didalam maupun di luar negeri dan masyarakat dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- p. Menyusun laporan dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala;
- q. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP);
- r. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- s. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan
- t. Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**PETA JABATAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA
KOTA MOJOKERTO**



BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Pengendalian dan Penggerakan Penduduk tahun 2018 sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk melalui program KB	Prosentase perkawinan Istri di bawah 20 tahun	16 %

B. Capaian Kinerja

FORMAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018
Menurunnya laju pertumbuhan penduduk melalui program KB	Prosentase perkawinan Istri di bawah 20 tahun	16 %	13,80%	86,25%

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap hasil capaian kinerja pada Seksi Pengendalian dan Penggerakan Penduduk Dinas P3AKB 2018 dapat disajikan sebagai berikut :

<p>Sasaran : Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk Melalui Program KB</p>
--

Pada perjanjian Kinerja Seksi Pengendalian dan Penggerakan Penduduk Dinas P3AKB hanya mempunyai satu sasaran yaitu Menurunnya laju Pertumbuhan Penduduk melalui Program KB dengan di dalamnya ditandahi dengan 1 Indikator kinerja yaitu :

1. Prosentase Perkawinan Isteri dibawah 20 Tahun

Kinerjanya secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut :

Ringkasan Capaian Sasaran Kinerja

Memperhatikan hasil capaian kinerja yang terdapat dalam format capaian kinerja Seksi Pengendalian dan Penggerakan Penduduk pada Dinas P3AKB tahun 2018 ini terhadap hasil capaian antara realisasi dan tarjet dari indikator kinerja dalam mendukung terwujudnya sasaran menurunnya laju pertumbuhan penduduk di Kota Mojokerto dapat diberikan penjelasan secara ringkas sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja prosentase Perkawinan Isteri dibawah 20 Tahun

berdasarkan Data laporan Usia Kawin Pertama Penduduk Wanita Kota Mojokerto dimana pada Tahun 2018 sebagaimana yang termuat dalam Perjanjian kinerja antara Kepala Bidang KB/Kepala Bidang Dalduk dan KB dengan Kepala Dinas P3AKB dengan tarjet sebesar 16 % dalam Realisasinya dapat tercapai dibawah tarjet kinerja tersebut yaitu 13,80 % atau dengan capaian kinerja sebesar 86,25 % dari target sebesar 16 %. Hal ini menunjukkan bahwa tidak tercapainya tarjet kinerja tersebut bukan berarti upaya menurunkan perkawinan dibawah 20 tahun mengalami kegagalan, justru hal ini menunjukkan keberhasilan karena kita dapat menekan terjadinya perkawinan penduduk Wanita usia dibawah 20 tahun sebesar 13,75 %

D. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan sebagai berikut :

Dengan melihat capaian indikator kinerja yang telah diuraikan secara ringkas diatas maka sudah tentu tetap diperlukan adanya tindak lanjut atas capaian indikator kinerja tahun 2018 dengan maksud dan tujuan untuk lebih meningkatkan capaian kinerja yang telah ditetapkan pada tahun – tahun yang akan datang. Oleh

karena itu adanya peningkatan kegiatan Advokasi dan KIE, Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pembinaan terhadap kinerja dan kelembagaan Dinas P3AKB Kota Mojokerto sesuai tugas dan fungsinya perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan.

E. Tanggapan Atasan Langsung

RUANG TANGGAPAN (DISPOSISI) ATASAN LANGSUNG

<input type="text"/>	Laporan kurang baik	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Laporan sudah baik	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Laporan diperbaiki	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Realisasi diteliti ulang	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Capaian diteliti ulang	<input type="text"/>

BAB III.

PENUTUP

Dengan melihat capaian kinerja Kepala Seksi Pengendalian dan Penggerakan Penduduk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana diatas, dapat disimpulkan bahwa secara umum tarjet kinerja yang telah ditetapkan telah tercapai kinerja sesuai dengan yang direncanakan

Mengetahui,

Atasan Langsung

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana



DJUNAEDI, SH, MM

Pembina

NIP. 19650616 199203 1 011

Tanggal, 25 Januari 2019

Kepala Seksi Pengendalian dan
Penggerakan Penduduk



KUS SULIONO, SH

Penata Tk. I

NIP. 19610130 19805 1 002

**LAPORAN KINERJA PEJABAT ADMINISTRATOR
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PUG, PUHA DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

**BAB I
PENDAHULUAN**

- (1) A. Bidang Pemberdayaan Perempuan, PUG, PUHA Dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan pengelolaan di Bidang Pemberdayaan Perempuan, PUG, PUHA Dan Pemberdayaan Masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
 - B. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas badan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1A) Bidang Pemberdayaan Perempuan, PUG, PUHA Dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. Mengkoordinasikan Penyiapan bahan perumusan kebijakan Pemberdayaan Perempuan, PUG, dan PUHA;
 - b. Mengkoordinasikan kelembagaan PUG, PUHA dan lembaga masyarakat pada lembaga pemerintah kota;
 - c. Mengkoordinasikan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan;
 - d. Mengkoordinasi bahan kebijakan Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan PUG, dan PUHA;
 - e. Mengkoordinasikan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak;
 - f. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan gender dan hak anak;
 - g. Mengkoordinasikan Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
 - h. Memverifikasi data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat kota;
 - i. Penyusunan program dan pemberian bimbingan teknis pelaksanaan, penyelenggaraan, fasilitasi, monitoring dan pelaporan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 - j. Penyusunan program, penyelenggaraan, fasilitasi, monitoring dan pelaporan pengembangan usaha ekonomi kelompok masyarakat;
 - k. Penyusunan program dan pemberian bimbingan teknis pelaksanaan, penyelenggaraan, fasilitasi, monitoring dan pelaporan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat;

- l. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
- m. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- n. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi dari Bidang Pemberdayaan Perempuan, PUG, PUHA Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto adalah :



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, PUG, PUHA Dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 sebagai berikut:

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja perempuan	1. Prosentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	55

		2. Prosentase Perempuan di lembaga pemerintahan	Partisipasi lembaga	45
2.	Menurunnya kesenjangan antara Perempuan dan Laki-Laki	1. Indeks Pemberdayaan Gender		55 %
		2. Prosentase Anggaran Responsif Gender (ARG)		45%
3.	Terpenuhinya Hak Anak dan Perlindungan Anak	3. Predikat Kota Layak Anak		2018
4.	Meningkatnya ekonomi kelompok usaha masyarakat	4. Prosentase Pengembangan Usaha Kelompok Masyarakat		67 %
		5. Prosentase Masyarakat Produktif	Kelompok Ekonomi	50 %

B. Capaian Kinerja

FORMAT CAPAIAN KINERJA

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2018	REALISASI 2018	CAPAIAN (%)
1	3	4	5	10	11
	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam proses pembangunan	1. Jumlah kelompok UPPKS aktif Prosentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	55%	100%	100%
		2. Jumlah kelompok bina keluarga Prosentase Partisipasi Perempuan di lembaga pemerintahan	45%	100%	
1	Menurunnya kesenjangan antara Perempuan dan Laki-laki	1. Indeks Pemberdayaan Gender 2. Prosentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	55% 45%	100% 100%	
2	Terpenuhinya Hak Anak dan Perlindungan Anak	1. Predikat Kota Layak Anak	45%	100%	
1	Meningkatnya ekonomi kelompok usaha masyarakat	1. Prosentase Pengembangan Usaha Kelompok Masyarakat	67%	100%	100%
		1. Prosentase Kelompok Masyarakat Ekonomi Produktif	50%	100%	100%

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran pada Bidang Pemberdayaan Perempuan, PUG, PUHA Dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 disajikan sebagai berikut :

Sasaran Strategis : Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di Parlemen dan Meningkatkan Jumlah Perempuan Dalam pengambil Keputusan di Pemerintah Daerah Kota Mojokerto

Mempunyai satu sasaran Yaitu Melakukan koordinasi dengan dinas terkait untuk meningkatkan sosialisasi dan pendidikan untuk perempuan serta perlu adanya , hasil capaian kinerjanya adalah sebagai berikut:

Ringkasan Capaian Sasaran Strategis

Indikator prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang bagus dengan target 90% hal ini dapat ditunjang dengan program kegiatan sebagai berikut :

1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan dari kegiatan Monev sampai akhir tahun 2018 anggaran sebesar Rp. 37.199.950,- tercapai 34.893.300,- atau 93,80%
2. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan dari kegiatan Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak anggaran Rp. 36.471.700,- sampai akhir tahun 2018 dapat tercapai Rp 1.638.250,- atau 4,49 %.
3. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan dari kegiatan Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak anggaran Rp. 124.962.650,- sampai akhir tahun 2018 dapat tercapai Rp. 115.642.330,- atau 92,54 %
4. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan dari kegiatan Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak anggaran Rp. 58.122.100,- sampai akhir tahun 2018 dapat tercapai Rp. 53.047.600,- atau 91,27 %
5. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan dari kegiatan Pembinaan organisasi perempuan terdapat anggaran Rp. 523.776.300,- sampai akhir tahun 2018 tercapai Rp.466.678.700,- atau 89.10 %.
6. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan dari kegiatan Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera anggaran Rp. 112.027.700,- sampai akhir tahun 2018 tercapai Rp.102.437.100,- atau 91,40 %.

7. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan pada Kegiatan bimbingan menejemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha terdapat anggaran Rp. 103.802.750,- sampai akhir tahun 2018 tercapai Rp. 83.469.200,- atau 80,41 %.
8. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan pada Kegiatan pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan terdapat anggaran Rp. 79.097.950,- sampai akhir tahun 2018 tercapai Rp. 58.030.750,- atau 73.37 %.
9. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan pada Kegiatan Penyusunan perencanaan penganggaran responsive gender terdapat anggaran Rp.37.061.000,- sampai akhir tahun 2018 tercapai Rp.36.083.500,- atau 97,36 %
10. Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak terdapat anggaran Rp. 187.000.000,- sampai akhir tahun 2016 tercapai Rp. 181.828.500,- atau 97 %.
11. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan pada kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan terdapat anggaran Rp. 23.825.800,- sampai akhir tahun 2018 tercapai Rp.21.452.200,- atau 90,04 %.
12. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan pada kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat terdapat anggaran Rp. 102.839.200,- sampai akhir tahun 2018 tercapai Rp.92.364.650,- atau 89,81 %.
13. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan pada kegiatan pemanfaatan dan penerapan teknologi tepat guna terdapat anggaran Rp. 156.344.000,- sampai akhir tahun 2018 tercapai Rp.141.286.375,- atau 90,37 %.
14. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan desa pada kegiatan pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa terdapat anggaran Rp. 115.807.800,- sampai akhir tahun 2018 tercapai Rp.97.832.750,- atau 84,48 %.
15. Dengan melihat capaian sasaran dan indikator kinerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas P3AKB yang didukung dengan 6 (enam) Program yang ada dengan total anggaran Rp. 1.571.754.800,- sampai akhir tahun anggaran 2018 dapat terealisasi Rp. 1.344.234.605,- atau 85.53 %. Hal ini sudah melebihi dari capaian indikator kinerja sebesar 85 %.

D. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut, sebagai berikut :

- Jalan Sehat Dalam Rangka Hari
- seminar Why Junk Food Is Unhelty
- Peringatan Hari Kartini Oleh GOW
- Pelatihan Dinamika Kelompok dan Pengambilan Keputusan Dalam Kelompok Bagi Pimpinan Kelompok PEKKA
- Pelatihan Managemen Usaha Frezen Food Bagi Kelompok PEKKA
- Gelar dagang HUT KOTA
- Pameran Hasil Karya Perempuan Kepala Keluarga
- Pembinaan Kelompok PEKKA di Tiap Kelurahan
- Pemantapan Tugas Pokok dan Fungsi Tim Penggerak PKK
- Sosialisasi Bumil Risti dan Penggunaan Buku KIA
- Hari Kesatuan Gerak PKK
- Sosialisasi Gemar Makan Ikan
- Pelatihan AdministrasiUP2K-PKK
- Lomba Membuat Beberan Simulasi
- Rapat Koordinasi Persiapan Evaluasi KLA
- Pengisian Indikator Evaluasi KLA berbasis Webs
- Sosialisasi dan Pembentukan Forum Anak tingkat Kelurahan s/d tingkat Kota
- Peringatan Hari Anak Nasional
- Rapat Koordinasi Berkala Tim Gugus Tugas KLA
- Rapat Berkala Tim Pokja PUG
Pembinaan Sekolah Ramah Anak
- Rapat Berkala Tim Driver PUG
- Pelatihan Pengembangan Kemitraan Bagi Lembaga Kemasyarakatan
- Pelatihan Managemen Administrasi Keuangan Bagi Pengurus LPM dan KPM
- Mengikuti Gelar TTG Nasional bagi Juara I Lomba Inovasi (TTG)
- Penganangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
- Pelatihan Administrasi Keuangan UPKu dan UED-SP
- Lomba Administrasi Pengelola UPKu dan UED-SP

E. Tanggapan Atasan Langsung

RUANG TANGGAPAN (DISPOSISI) ATASAN LANGSUNG

<input type="text"/>	Laporan kurang baik	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Laporan sudah baik	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Laporan diperbaiki	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Realisasi diteliti ulang	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Capaian diteliti ulang	<input type="text"/>

BAB III
PENUTUP

Pada Bidang Pemberdayaan Perempuan, PUG, PUHA Dan Pemberdayaan Masyarakat, dapat disimpulkan secara umum bahwa telah tercapai kinerja pada Seksi Pemberdayaan Ekonomi Partisipasi Dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Seksi Penguatan dan Pengembangan PUG dan PUHA.

Mengetahui,
Atasan Langsung
Kepala Dinas PP, Perlindungan Anak
Dan Pemberdayaan Masyarakat

Tanggal, 2019
Kepala Bidang Bidang PP, PUG, PUHA
Dan Pemberdayaan Masyarakat

MOCH IMRON, S.Sos.MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19720828 199201 1 001

DRS. WAHYU SRI SEDONO M.Si
Pembina
NIP. 19640415 199403 1 013

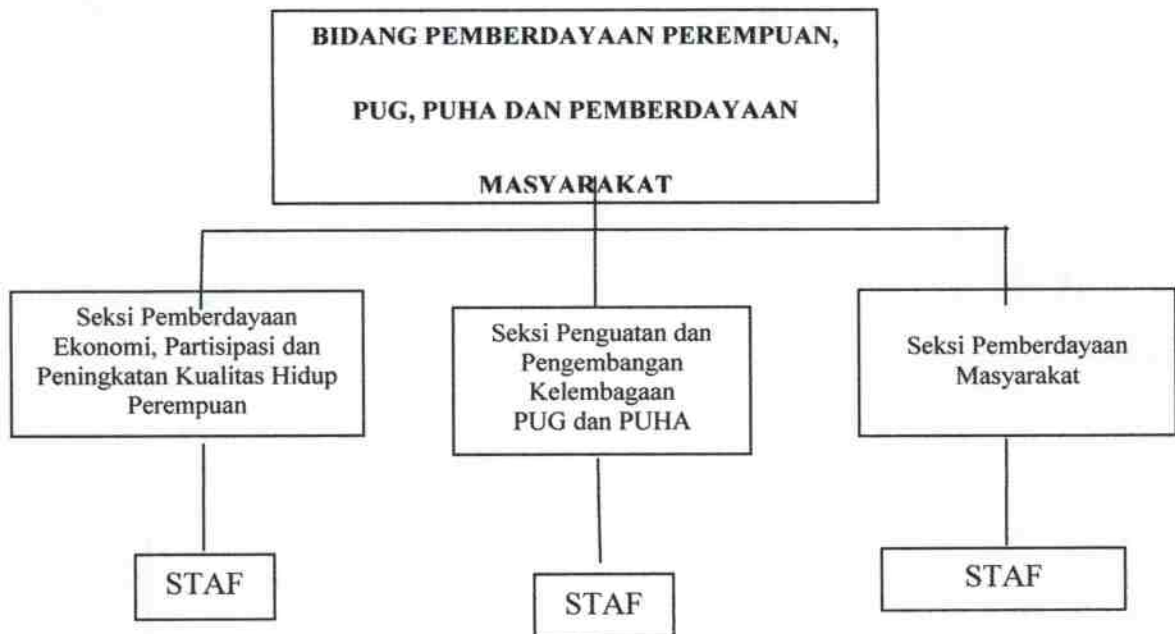
LAPORAN KINERJA JABATAN
SEKSI PEMBERDAYAAN EKONOMI PARTISIPASI DAN PENINGKATAN KUALITAS
HIDUP PEREMPUAN

BAB I
PENDAHULUAN

Seksi Pemberdayaan Ekonomi Partisipasi Dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas :

- a. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan sumberdaya ekonomi perempuan;
- c. Menyiapkan pedoman dan pelaksanaan dalam rangka peningkatan peran serta perempuan dibidang ekonomi;
- d. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait dalam upaya penguatan ekonomi perempuan;
- e. Menyiapkan bahan analisis partisipasi perempuan dalam bidang pembangunan;
- f. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) ;
- g. Pembinaan, supervisi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi pelaksanaan gerakan pembendayaan kesejahteraan keluarga (PKK);
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan sumberdaya ekonomi perempuan;
- i. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

Struktur organisasi dari Bidang Pemberdayaan Perempuan, PUG, PUHA dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto adalah :



BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Seksi Pemberdayaan Ekonomi Partisipasi Dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja perempuan	1. Prosentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	55
		2. Prosentase Partisipasi Perempuan di lembaga pemerintahan	45

B. Capaian Kinerja

FORMAT CAPAIAN KINERJA

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam proses pembangunan.	Prosentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	55	100 %	100 %
	Prosentase Partisipasi Perempuan di lembaga pemerintahan	45	100%	100 %

Yang dimaksud dengan angkatan kerja adalah yang berada dalam usia kerja, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat, penduduk yang tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja, batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah umur 15 Tahun – 64 Tahun, di kota Mojokerto jumlah penduduk per Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Angkatan kerja berdasarkan jenis kelamin	Jumlah Pekerja Perempuan (Partisipasi Kerja)	Di lembaga Pemerintahan	Di Lembaga Non pemerintahan
Laki-laki	38,390	3,305	35,085
Perempuan	16,159	1,764	14,395

Dari tabel tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa angkatan kerja non pemerintahan di kota Mojokerto antara laki-laki dan perempuan lebih tinggi laki-laki, sedangkan yang pada lembaga pemerintahan masih didominasi tenaga kerja laki-laki, berpartisipasi di lembaga pemerintah berdasarkan data tersebut partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah maupun di lembaga non Pemerintahan masih rendah

C. Evaluasi

Dengan banyaknya angkatan kerja perempuan di non pemerintahan maka menjadi peluang untuk melakukan pemberdayaan perempuan yang berupa pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan pendapatan keluarga

D. Rencana Tindak Lanjut

Untuk menampung hasil karya perempuan dalam pembangunan maka diadakan pameran atau gelar dagang dari hasil karya perempuan dan juga diadakan Pelatihan atau bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha

E. Tanggapan Atasan Langsung

RUANG TANGGAPAN (DISPOSISI) ATASAN LANGSUNG

Laporan kurang baik

<input type="text"/>	Laporan sudah baik	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Laporan diperbaiki	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Realisasi diteliti ulang	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Capain diteliti ulang	<input type="text"/>

**BAB III
PENUTUP**

Seksi Pemberdayaan Ekonomi Partisipasi Dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan untuk Tahun 2018 dapat disimpulkan sudah sesuai dengan perjanjian kinerja dengan tarjet yang telah ditentukan.

Mengetahui

Atasan Langsung
Kepala Bidang Pemberdayaan
Perempuan, PUG,PUHA dan
Pemberdayaan Masyarakat


Drs. WAHYU SRI SEDONO, M.SI
Pembina
NIP. 196404151999431013

Tanggal
Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi
Partisipasi dan Peningkatan Kualitas Hidup
Perempuan


ANA MUFARRIKHAH, SE
Penata
NIP. 19781102 200112 2 002

**LAPORAN KINERJA PEJABAT PENGAWAS
KEPALA SEKSI PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PUG DAN PUHA**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Kepala Seksi Penguatan dan Pengembangan PUG dan PUHA mempunyai tugas:

- a. Menyusun kebijakan teknis dibidang PUG dan PUHA;
- b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan PUG dan PUHA;
- c. Menyusun dan melaksanakan kebijakan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
- d. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
- e. Pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat kota;
- f. Melaksanakan pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi tentang PUG dan PUHA;
- g. Melaksanakan fasilitasi jejaring PUG dan PUHA;
- h. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan bidang PUG dan PUHA;
- i. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
- j. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) ;
- k. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk pelaksanaan dan pemanfaatan hasil analisis dan formasi jabatan serta pengembangan kinerja;

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Penguatan dan Pengembangan PUG dan PUHA Tahun 2018 sebagai berikut:

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menurunnya kesenjangan antara Perempuan dan Laki-Laki	1. Indeks Pemberdayaan Gender	55 %
		2. Prosentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	45 %
2.	Terpenuhinya Hak Anak dan Perlindungan Anak	3. Predikat Kota Layak Anak	2018

B. Capaian Kinerja

FORMAT CAPAIAN KINERJA

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Menurunnya kesenjangan antara Perempuan dan Laki-laki	Indeks Pemberdayaan Gender	55 %	100%	100%
	Prosentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	45 %	100 %	100 %

Struktur organisasi di Bidang Pemberdayaan Perempuan, PUG, PUHA dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga Berencana Kota Mojokerto adalah :



Gambar 1. Struktur Organisasi

Terpenuhinya Hak Anak dan Perlindungan Anak	Predikat Kota Layak Anak Perempuan di	45 %	100%	100%
---	---------------------------------------	------	------	------

Yang dimaksud dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah Indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. Penghitungan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) disusun berdasarkan tiga komponen yaitu (1) Keterwakilan di Parlemen (2) Indeks Pengambilan Keputusan dan (3) Indeks Distribusi Pendapatan adalah sebagai berikut:

Jumlah Penduduk	Keterwakilan Diparlemen	Pengambil Keputusan	Distribusi Pendapatan
Laki-Laki	16	43	-
Perempuan	9	8	-
Jumlah	25	51	

Dari tabel tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Keterwakilan Perempuan di Parlemen di Kota Mojokerto yang seharusnya 30 % sudah terpenuhi 32 %, sedangkan untuk kedudukan Perempuan Pengambil Keputusan (Kepala Organisasi Perangkat Daerah) baru terpenuhi 18,60 % dari jumlah keseluruhan Pengambil Keputusan (Kepala Organisasi Perangkat Daerah) di wilayah Pemerintah Daerah Kota Mojokerto.

Sedangkan untuk data pendapatan kita belum memiliki data tersebut karena selama ini kita belum pernah melakukan pendataan terhadap penghasilan dari masing-masing person warga Kota Mojokerto. Dari data tersebut diatas maka keterwakilan perempuan di parlemen masih didominasi oleh laki-laki dan Keterwakilan perempuan dalam Pengambil Keputusan di Pemerintah Daerah Kota Mojokerto masih didominasi oleh laki-laki.

C. Evaluasi Keterwakilan Perempuan di Parlemen

Untuk Keterwakilan Perempuan di Parlemen yaitu dengan cara melakukan koordinasi dengan dinas terkait untuk meningkatkan sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk perempuan. Sedangkan untuk meningkatkan jumlah Perempuan dalam Pengambil Keputusan di Pemerintah Daerah Kota Mojokerto perlu ditingkatkan karena di level tingkat Kelurahan belum ada Keterwakilan Perempuan dalam Pengambil Keputusan jadi Pengambil Keputusan (pimpinan) di Pemerintah Daerah Kota Mojokerto masih didominasi oleh angkatan kerja laki-laki dan perlu menambahkan kuota 5 (lima) persen untuk pengambil keputusan (Pimpinan) berada di posisi Perempuan.

D. Rencana Tindak Lanjut

1. Dikarenakan harus ada kesetaraan dan keadilan gender maka perlu adanya kebijakan di Tingkat Kota Mojokerto untuk posisi pengambil keputusan (pimpinan) ditambah 5 %
2. Melakukan Rapat Koordinasi Perumusan Kebijakan Bagi Pengambil Keputusan untuk Mengimplementasikan Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)
3. Untuk Tahun 2019 akan melakukan Rapat koordinasi Berkala Tim Gugus Tugas KLA, Rapat Koordinasi Berkala Tim Pokja Pengarusutamaan Gender, dan Rapat Tim Driver Pengarusutamaan Gender
4. Mengoptimalkan Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah.

5. Untuk meningkatkan jumlah Dokumen Anggaran Pemerintah Daerah Kota Mojokerto yang Responsif Gender untuk tahun 2019 maka perlu dilakukan Rapat Koordinasi Tim Kelompok Kerja PUG anggotanya dari masing-masing Kepala OPD di Pemerintah Kota Mojokerto.

D. Tanggapan Atasan Langsung

RUANG TANGGAPAN (DISPOSISI) ATASAN LANGSUNG

<input type="text"/>	Laporan kurang baik	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Laporan sudah baik	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Laporan diperbaiki	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Realisasi diteliti ulang	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Capaian diteliti ulang	<input type="text"/>

BAB
PENUTUP

Pada Kepala Seksi Pengembangan PUG dan PUHA untuk tahun 2018, dapat disimpulkan bahwa telah tercapai kinerja sesuai target yang telah ditentukan

Mengetahui,

Atasan Langsung

Kepala Bidang Pemberdayaan
Perempuan, PUG, PUHA dan
Pemberdayaan Masyarakat



Drs. WAHYU SRI SEDONO, M.Si

Pembina

NIP. 19640415 199403 1 013

Tanggal, 28 Januari 2019

Kepala Seksi Pengembangan
PUG dan PUHA



MUNTAMAH, SH

Penata

NIP. 19751023 199703 2 004